

FORM ISIAN DATA RISET / KAJIAN DAN INOVASI

NO	NAMA OPD	JUDUL RISET / KAJIAN/INOVASI	DESKRIPSI
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kajian kapasitas daya tampung dan daya dukung sungai seghah di Kabupaten berau	<p>Kajian mengenai daya tampung dan daya dukung lingkungan wajib dilaksanakan dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah untuk mengetahui daya tampung dan daya dukung sungai seghah. Namun pada kenyataannya, variasi daya tampung dan daya dukung lingkungan belum banyak dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan dan penggunaan lahan. Oleh karenanya sering terjadi kerancuan dalam pengambilan keputusan tentang penentuan prioritas wilayah dan kegiatannya. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat adanya kelangkaan informasi daya tampung dan daya dukung wilayah termasuk variasi keruangannya.</p> <p>Keberlanjutan pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang mampu memanfaatkan dan menjaga daya dukung lingkungan sebagai basis perumusan kebijakan yang mampu menjaga kestabilan lingkungan dan wilayah. Pembangunan tidak efisien jika tidak memanfaatkan daya dukung wilayah yang tersedia. Imbangan antara tingkat pemanfaatan sumber daya dan daya dukung wilayah menjadi ukuran kelayakan setiap program</p> <p>Kabupaten Berau sebagai pusat salah satu pertumbuhan perekonomian terutama kegiatan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini perlu melakukan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan lingkungannya agar pertumbuhan dan perkembangan tersebut dapat berkelanjutan tanpa merusak dan mencemari lingkungan.</p> <p>Berkaitan dengan pentingnya mengetahui Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan tersebut, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Berau akan melakukan kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Segah Yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Berau dan mempunyai potensi yang sangat vital bagi masyarakat setempat antara lain adalah sebagai Sumber bahan baku air bersih/air minum daerah (PDAM) daerah sekitarnya. Hasil kajian tersebut nantinya dapat digunakan dalam penyusunan program dan rencana aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan sungai serta perencanaan dan pengelolaan pembangunan berdasarkan variasi kerugian Kabupaten Berau.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran air Danau Dan/Atau Waduk serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup</p>

			Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Maka hasil kajian ini akan dituangkan dalam bentuk Rekomendasi tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Segah.
2	Dinas Kesehatan	Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)	yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kesehatan masyarakat. (2013)
		Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (RISNAKES)	yang bertujuan untuk memperoleh gambaran ketenagaan di bidang kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten/kota, provinsi dan nasional. (2017)
		Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes)	yang bertujuan untuk menyediakan informasi besaran masalah faktor resiko terkait derajat kesehatan yang diukur, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan Indonesia (2018)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Strategi Pencegahan Dini Bencana Berbasis Masyarakat	Salah satu tujuan membentuk Negara Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini melindungi dari seluruh ancaman yang ada baik dari eksternal maupun internal. Salah satu adalah dari ancaman bencana, dimana Indonesia mempunyai 12 ancaman bencana baik dari sisi geologi, hidrometeorologi, biologi, dan gagal teknologi. Berdasarkan data dan informasi Bencana Indonesia yang bebas dari ancaman bencana (BNPB, 2016) Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai indeks resiko bencana tinggi, sehingga perlu penanganan yang cepat dan tepat penanganan Bencana akan dapat optimal bila dilakukan oleh tiga komponen yaitu, Pemerintah, Masyarakat dan Usaha (swasta). Dalam menangani bencana di Kabupaten Berau baik Pra Bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana, BPBD Berau melibatkan masyarakat melalui Pembentukan Komunitas Masyarakat Peduli Bencana (MPB) di setiap kecamatan/kampung sebagai relawan. Tugas dan fungsi MPD ini adalah melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemberian informasi dan kejadian bencana di lingkungan masing-masing kepada masyarakat dan juga kepada BPBD Berau melalui Sosialisasi dan Bimtek sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai relawan akan lebih efektif dan optimal.
4	Dinas Perikanan	Kajian Daya Dukung Lahan Budidaya Tambak di Kabupaten Berau (Tahun 2011)	1. Karakteristik lahan kawasan pesisir kabupaten Berau dicirikan dengan topografi yang relatif landai dan elevasi yang tidak terlalu tinggi dan pasang susrut yang tergolong tinggi (2,85m) untuk budidaya. Tanah tergolong sulfat masam dengan potensi kemasaman dan kandungan unsur hara makro yang rendah. Kualitas air secara umum mendukung usaha

			<p>budidaya tambak, kecuali bahan organik total air yang sangat tinggi</p> <p>2. penggunaan/penutup lahan di kawasan pesisir terdiri dari vegetasi mangrove, vegetasi jarang, vegetasi rapat, lahan terbuka, pemukiman dan tambak.</p> <p>3. Hasil evaluasi kesesuaian lahan menunjukkan bahwa dari luas tambak yang ada di Kabupaten Berau yaitu 6.022.761 ha ternyata tidak ada yang tergolong sangat sesuai.</p>
		<p>Remediasi Tanah Sulfat Masam Untuk Budidaya Windu Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (tahun 2013)</p>	<p>1. Kabupaten Berau potensial untuk pengembangan budidaya tambak yang strategis dalam mendukung peningkatan produksi perikanan.</p> <p>2. Remediasi dasar tanah pada tambak tanah sulfat masam diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tambak sehingga bisa untuk budidaya udang baik dengan sistem monokultur maupun polikultur udang windu dan bandeng</p> <p>- Evaluasi Kesesuaian lahan budidaya laut di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2015)</p> <p>1. Faktor pembatas dari aspek lahan dalam pengembangan budidaya laut di Kabupaten Berau adalah kedalaman perairan yang rendah di kawasan pesisir, keterlindungan yang kurang memadai, kekeruhan air yang tinggi.</p> <p>2. Budidaya rumput laut metode tali panjang dapat dilakukan Kecamatan Batu Putih dan Maratuia dengan luas lahan yang sesuai masing-masing 6.300 dan 9000 ha, tetapi daya dukung lahannya masing-masing 2268 dan 3240 ha yang masing-masing dapat dimanfaatkan untuk 14.175 dan 20150 unit budidaya rumput laut berukuran 40x40 m.</p> <p>3. Budidaya ikan dalam keramba jaring apung dapat dilakukan dikecamatan bduk-biduk, batu putih dan maratua.</p> <p>4. komoditas yang dapat dikembangkan dalam budidaya ikan dalam keramba jaring apung adalah ikan kerapu.</p> <p>5. diperlukan adanya kebun bibit rumput laut di beberapa lokasi yang dapat menjadi pemasok bibit pada budidaya.</p> <p>6. Balai benih ikan pantai di Talisayan perlu dilengkapi fasilitasnya agar dapat menjadi pemasok benih ikan untuk budidaya ikan dalam keramba jaring apung yang selama ini hanya berasal dari tangkapan di alam atau berasal dari hatchery atau balai benih ikan pantai lainnya.</p> <p>7. Ketersediaan pakan buatan yang dapat menjamin kualitas dan kuantitas pakan buatan untuk budidaya ikan dalam keramba jaring apung.</p> <p>8. peningkatan kapasitas (kuantitas dan kualitas) sumberdaya manusia untuk budidaya laut yang dapat dilakukan dengan melaksanakan berbagai pelatihan teknis dan manajemen, sosialisasi dan pilot uji coba.</p>

5	Kecamatan Pulau Derawan	Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajb Pajak Pada Retribusi Pajak Bumi dan Bangunan	<p>-Hasil Pencapaian/target persentase berkisar 60% s/d 68% dari penyetoran wajib pajak</p> <p>-Perlunya kesepakatan bersama dari semua kalangan stakeholder, baik jasa pelayanan pertanahan (Legalitas), jasa pinjaman Bank sebagai agunan dll. Artinya tidak akan memberikan pinjaman tanpa persyaratan yang sah/lengkap termasuk jaminan tanah wajib pajak.</p>
6	BAPLITBANG	Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Bidang Pariwisata Kabupaten Berau	<p>Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang didasari oleh Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Tujuan penguatan SIDa adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, serta mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011. Hal ini juga sesuai dengan program utama Kemenristek, yaitu Penguatan Sistem Inovasi Nasional yang tercantum dalam Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.</p> <p>Sebagai Kabupaten yang mengusung visi daerah “Mewujudkan Kabupaten Berau Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agribisnis Dan Tujuan Wisata, Serta Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Sejahtera” sampai 5 tahun ke depan, Kabupaten Berau membutuhkan penguatan daya dukung dan peningkatan daya saing, khususnya di sektor-sektor ekonomi andalan, seperti pertanian dan pariwisata. Oleh karena itu, dibutuhkan sejumlah inovasi yang berbasis pada IPTEK dimana pada gilirannya dibutuhkan penyusunan roadmap penguatan sistem inovasi untuk sektor-sektor andalan tersebut. Pada tahun anggaran 2013 ini, prioritas diberikan pada kebijakan sektor pariwisata yang memerlukan penguatan sistem inovasi. Sistem inovasi dalam bidang pariwisata, terdiri atas beberapa hal yakni; 1) Sistem inovasi pariwisata di bidang produk/jasa pariwisata yang ditawarkan (inovasi pengembangan produk pariwisata) 2). Sistem inovasi pariwisata di bidang proses/desain konsep pariwisata 3). Inovasi dalam bidang manajemen dan logistik pariwisata dan 4) Inovasi dalam institusi pariwisata.</p>
		Perencanaan Pengelolaan Kawasan KARST Kabupaten Berau	<p>Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten di wilayah provinsi Kalimantan timur yang masuk ke dalam kawasan Strategis Heart Of Borneo. Arah pemanfaatan ruang kawasan heart Of Borneo di provinsi ini diarahkan menjadi 2 jenis pemanfaatan, yaitu kawasan lindung, dan kawasan budidaya. Kawasan Karst merupakan aset yang tak ternilai harganya, baik sebagai sumberdaya alam hayati maupun pariwisata dan bernilai ekonomi tinggi. Kawasan Karst pada satu sisi memiliki peranan yang tidak kecil bagi perlindungan</p>

			<p>sumber cadangan air dan sumberdaya hayati yang beragam dan berlimpah, namun pada sisi yang lain, juga merupakan penyimpanan cadangan bahan baku semen dan marmer yang cukup menjanjikan. Kondisi ini cenderung menyebabkan konflik pemanfaatan. Karena keunikannya kawasan karst juga menjadi perhatian dari beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk perladangan, pertanian, pengambilan rotan, sarang burung walet dan juga sebagai sumber nahan obat-obatan tradisional. Di kawasan ini juga terdapat gua-gua makan dan patung-patung hindu yang berasal dari abad ke – 5.</p>
		<p>Kajian Potensi Sumber Daya Alam dan Pariwisata</p>	<p>Terdapat permasalahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata. Permasalahan tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pariwisata berlaku secara parsial sektoral, diatur tersendiri dan berdiri sendiri, sehingga seringkali menimbulkan kontra-produktif antara satu sektor dengan sektor lainnya. b. Kelembagaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan pariwisata belum terintegrasi, berjalan sendiri-sendiri, sehingga seringkali menimbulkan konflik kepentingan antar lembaga. c. Pemanfaatan sumber daya alam cenderung lebih mengutamakan manfaat ekonomi dan kurang mempertimbangkan manfaat sosial dan manfaat lingkungan hidup secara simultan. d. Pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata selama ini belum memenuhi asas keadilan terhadap masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi sumberdaya alam dan pariwisata e. Luasnya dan keanekaragaman sumber daya alam dan pariwisata, belum diimbangi dengan ketersediaan data dan prasarana untuk dapat melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, perlindungan, rehabilitasi, dan pemanfaatan. f. Kabupaten Berau juga menyimpan berbagai permasalahan yang perlu ditangani secara terintegrasi. Untuk mencapai pengelolaan secara terintegrasi antar segenap pengguna (<i>stakeholder</i>), maka diperlukan penataan sumber daya alam yang teralokasi optimal sesuai dengan karakteristik wilayah, sehingga para pengambil keputusan memiliki landasan yang kuat dalam menetapkan segenap kebijakan pengelolaan di wilayah ini. <p>Berdasarkan pemikiran di atas, maka dalam rangka pengembangan potensi sumber daya alam dan pariwisata di Kabupaten Berau.</p> <p>Arahan pengelolaan sumber daya alam berisi program utama jangka panjang yang dirinci ke</p>

			<p>dalam program jangka menengah lima tahunan di wilayah studi, yang mencakup indikasi program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, perkiraan pembiayaan, sumber dana, kelembagaan, dan instansi pelaksana yang distrukturkan dalam indikasi program pengembangan daya dukung dan daya tampung, indikasi program pengembangan produktivitas.</p> <p>Arahan pengelolaan pariwisata berisi program utama jangka panjang yang dirinci ke dalam program jangka menengah lima tahunan di wilayah studi, yang mencakup indikasi program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, perkiraan pembiayaan, sumber dana, kelembagaan, dan instansi pelaksana yang distrukturkan dalam indikasi program destinasi pariwisata, indikasi program pengembangan industri pariwisata dan indikasi program pengembangan kelembagaan pariwisata.</p>
--	--	--	---